

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian perkotaan (*urban farming*) telah menjadi peristiwa besar dimana berkaitan dengan laju urbanisasi yang semakin tinggi. Perluasan wilayah perkotaan yang terus menerus menyebabkan munculnya strategi adaptif yang memungkinkan penduduk kota mempertahankan aktivitas pertanian di lahan-lahan marginal, pekarangan rumah, dan ruang terbuka hijau. Van der Schans (2010) mendefinisikan pertanian perkotaan sebagai kegiatan produksi pertanian yang dilakukan di dalam atau di sekitar kawasan kota, yang mencakup berbagai komoditas mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga tanaman rempah dan obat-obatan yang bernilai ekonomi tinggi.

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tekanan urbanisasi yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mencapai rata-rata 1,01% per tahun dalam lima tahun terakhir, dengan puncaknya mencapai 1,09% pada tahun 2025 (Lampiran 1). Fenomena ini juga diiringi oleh penyusutan luas lahan pertanian di kawasan perkotaan rata-rata 79.607 hektar per tahun. Dalam konteks ini, laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat menjadi alasan mengapa pertanian perkotaan di Indonesia bukan sekadar menjadi hobi atau kegiatan subsistem, melainkan telah berkembang menjadi sumber penghidupan nyata bagi sebagian masyarakat kota terutama di kota-kota kecil dan menengah yang masih mempertahankan karakter semi-agrikultur. Irawan (2005) mendokumentasikan bahwa lahan pertanian di kawasan perkotaan secara konsisten mengalami tekanan konversi akibat ekspansi pembangunan perumahan, perdagangan, dan infrastruktur. Di satu sisi tekanan konversi lahan berlangsung, di sisi lain permintaan terhadap produk pertanian segar dari kawasan kota terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran gaya hidup sehat. Ketegangan antara penyusutan lahan dan meningkatnya permintaan ini mendorong petani perkotaan untuk mengoptimalkan komoditas bernilai tinggi, salah satunya tanaman biofarmaka.

Produksi komoditas biofarmaka nasional secara konsisten menunjukkan pola peningkatan dalam lima tahun terakhir (Lampiran 2), menyoroti potensi ekonomi yang

signifikan dari sektor ini. Dalam peta pertanian perkotaan nasional, tanaman biofarmaka khususnya kunyit (*Curcuma longa L.*) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan petani maupun sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi yang mendukung industri jamu, farmasi, dan kosmetik. Kunyit (*Curcuma longa L.*) merupakan salah satu komoditas biofarmaka unggulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam budaya dan perekonomian Indonesia. Secara historis, kunyit telah dimanfaatkan secara luas sebagai bumbu masakan khas Nusantara, bahan obat tradisional, pewarna alami, serta bahan baku industri jamu dan kosmetik (Elfahmi *et al.*, 2014). Menurut data Badan Pusat Statistik (2025), produksi kunyit nasional mencapai 146,48 juta kilogram, menempatkannya sebagai tanaman biofarmaka dengan volume produksi tertinggi nomor 3 setelah jahe dan kapulaga di Indonesia. Besarnya volume produksi ini mencerminkan luasnya basis usahatani kunyit yang tersebar di berbagai daerah pada setiap provinsi dan menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan bagi para petaninya.

Tingginya produksi kunyit sejalan dengan permintaan pasar yang terus berkembang, baik di tingkat domestik maupun ekspor. Di pasar domestik, kebutuhan kunyit meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pemanfaatan tanaman herbal (*back to nature*). Chattopadhyay *et al.* (2004) menegaskan bahwa kurkumin sebagai senyawa aktif utama kunyit telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antikanker, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk berbasis kunyit di industri kesehatan dan pangan fungsional. Di pasar ekspor, kunyit Indonesia telah dikenal luas di berbagai negara, dengan negara tujuan utama antara lain India, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2020). Kondisi ini membuka peluang usahatani kunyit yang sangat menjanjikan, sekaligus mendorong pertanyaan mendasar mengenai seberapa layak dan menguntungkan usahatani kunyit bagi petani yang menjalankannya.

Untuk menjawab pertanyaan kelayakan tersebut, penting secara ilmiah untuk menganalisis viabilitas finansial usahatani kunyit. Viabilitas finansial merujuk pada

kemampuan usaha tani menghasilkan penerimaan yang secara konsisten melampaui seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga menjamin keberlangsungan dan profitabilitas usaha dalam jangka panjang (Soekartawi, 2002). Salah satu instrumen analisis viabilitas yang paling umum digunakan adalah *Revenue/Cost Ratio* (R/C Ratio) atau nisbah penerimaan atas biaya, karena kesederhanaan dan kemudahan interpretasinya. R/C Ratio dihitung dengan membagi Total Penerimaan (TP) dengan Total Biaya (TB), di mana semakin besar nilai R/C Ratio (lebih dari 1), semakin tinggi tingkat keuntungan relatif yang diperoleh petani (Soekartawi, 2002; Suratiyah, 2015). Di samping kelayakan finansial, viabilitas usaha tani juga tidak dapat dilepaskan dari seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani dan masyarakat. Hernanto (1993) menegaskan bahwa kontribusi usaha tani terhadap pendapatan rumah tangga petani merupakan cerminan nyata dari peran komoditas dalam menopang kesejahteraan keluarga petani.

Kontribusi pendapatan usaha tani terhadap total pendapatan rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai seberapa besar ketergantungan ekonomi keluarga petani terhadap satu komoditas tertentu. Pendapatan rumah tangga petani umumnya bersumber dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan *on-farm* (dari kegiatan usaha tani di lahan sendiri), pendapatan *off-farm* (dari kegiatan pertanian di luar lahan milik sendiri), dan pendapatan *non-farm* (dari kegiatan di luar sektor pertanian) (Sajogyo, 1994; Ellis, 1998). Semakin tinggi proporsi pendapatan yang berasal dari usahatani kunyit terhadap total pendapatan rumah tangga, semakin besar pula peran strategis komoditas tersebut dalam menopang kehidupan keluarga petani. Dalam konteks pertanian perkotaan di Kota Solok, pemahaman atas besaran kontribusi ini sangat diperlukan agar kebijakan pengembangan usahatani kunyit dapat dirancang secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penelitian Siadari dan Saragih (2021) di Kabupaten Simalungun menemukan bahwa pendapatan usaha tani biofarmaka memberikan kontribusi hingga 84,1% terhadap total pendapatan keluarga petani, mengindikasikan betapa sentralnya komoditas biofarmaka termasuk kunyit sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga petani. Penelitian tersebut menemukan bahwa usahatani kunyit di Kabupaten

Simalungun layak diusahakan dengan nilai R/C Ratio sebesar 2,14 dan B/C Ratio sebesar 1,14, yang berarti setiap satu rupiah yang diinvestasikan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,14. Kusnadi et al. (2020) juga membuktikan keuntungan petani kunyit di Kabupaten Sukabumi dengan R/C Ratio 1,20. Hasil-hasil penelitian ini secara konsisten menggambarkan usahatani kunyit sebagai kegiatan yang menguntungkan dan viabel di berbagai wilayah produksi Indonesia.

Melihat potensi ini, Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah penghasil kunyit dengan keunggulan kompetitif. Kondisi geografis Kota Solok yang berada pada ketinggian 390 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara berkisar 26,1-28,9 derajat Celsius, curah hujan rata-rata 184,31 mm per bulan, dan kelembaban udara rata-rata 81% menciptakan iklim yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman rimpang (BPS Kota Solok, 2024). Kondisi agroklimat ini sesuai dengan persyaratan tumbuh optimal kunyit yang dikemukakan oleh Balittro (2008), yaitu suhu 20-30 derajat Celsius dengan curah hujan 1.500-2.000 mm per tahun dan pH tanah 5,5-7,0. Keunggulan agroklimat tersebut terbukti menghasilkan kunyit berkualitas tinggi dengan ukuran rimpang yang besar (jumbo), yang bahkan diakui kualitasnya oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perkembangan produksi tanaman biofarmaka di Kota Solok, seperti yang ditunjukkan oleh data terbaru (Lampiran 3), menempatkan kunyit sebagai komoditas unggulan dengan volume produksi tertinggi. Namun demikian, kondisi lapangan menunjukkan bahwa produksi kunyit di Kota Solok tengah menghadapi tekanan yang cukup serius. Serangan hama dan penyakit jamur pada rimpang kunyit menjadi salah satu penyebab utama penurunan produktivitas, karena infeksi jamur yang menyerang bagian rimpang di dalam tanah menyebabkan busuk rimpang dan kegagalan panen yang merugikan petani. Di samping itu, sebagian petani kunyit di Kota Solok mulai beralih menanam jagung sebagai komoditas substitusi yang dinilai lebih menguntungkan dan memiliki siklus panen yang lebih singkat, sehingga jumlah petani yang aktif menekuni usahatani kunyit terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Dua tekanan ini, yaitu ancaman hama penyakit dan pergeseran pilihan komoditas,

menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan usahatani kunyit di Kota Solok yang perlu dikaji lebih mendalam.

Potensi agroklimat tersebut perlu didukung oleh kerangka regulasi yang kuat agar pengembangan kunyit Kota Solok dapat berjalan optimal dan terstruktur. Secara normatif, peran pemerintah dalam pengembangan pertanian di Indonesia didasarkan pada regulasi yang bertingkat. Pada tingkat konstitusional, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan negara menguasai bumi dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman mewajibkan pemerintah menyediakan sarana produksi, pembinaan teknis, serta perlindungan bagi petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara eksplisit mengatur kewajiban pemerintah menyediakan prasarana pertanian, jaminan kepastian usaha, stabilisasi harga komoditas, dan sistem asuransi pertanian. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman mengatur bimbingan, pengawasan, dan fasilitasi budidaya termasuk tanaman biofarmaka. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Solok menerjemahkan amanat regulasi nasional tersebut ke dalam program pembangunan pertanian lokal yang spesifik dan terukur.

Merujuk pada kerangka regulasi tersebut, Pemerintah Kota Solok telah mengintegrasikan pengembangan komoditas kunyit ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2021–2026 sebagai komoditas unggulan daerah. Dalam tataran kebijakan, RPJMD tersebut memuat sejumlah program strategis yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pertanian perkotaan berbasis kunyit, antara lain program pengembangan komoditas unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta penguatan kelembagaan petani. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, implementasi program-program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Dukungan pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh petani kunyit di Kota Solok saat ini terbatas pada kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya yang dilakukan oleh tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian Kota Solok. Sementara itu, bantuan sarana produksi berupa bibit kunyit yang sebelumnya pernah diberikan kepada

kelompok tani, sudah tidak lagi direalisasikan sejak tahun 2023. Ketiadaan bantuan bibit ini menjadi beban tambahan bagi petani, mengingat biaya pengadaan bibit merupakan salah satu komponen biaya produksi terbesar dalam usahatani kunyit. Kesenjangan antara kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan realisasi dukungan yang diterima petani di lapangan mencerminkan tantangan implementasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan. Dari sisi sumber daya manusia, data BPS Kota Solok (2024) menunjukkan bahwa sebesar 64,33% penduduk berada pada kelompok usia produktif dan sebesar 16% penduduk bekerja di sektor pertanian, yang menciptakan basis tenaga kerja yang memadai untuk mendukung pengembangan usahatani kunyit secara berkelanjutan di Kota Solok.

Meski dukungan kebijakan melalui RPJMD dan keunggulan agroklimat telah tersedia, Kota Solok masih menghadapi serangkaian tantangan nyata yang mengancam keberlanjutan usahatani kunyit di tingkat petani. Dari total luas wilayah 57,64 km², hanya 21,76% berupa tanah sawah, sementara 78,24% berupa tanah kering. Lahan kunyit tergolong lahan pertanian bukan sawah dengan karakteristik berbukit dan lereng. Lahan sawah bahkan terus mengalami tekanan penyusutan akibat konversi ke permukiman dan fasilitas perkotaan (Lampiran 4).

Dengan kondisi geografis dan iklim yang sesuai, Kota Solok telah berkembang menjadi sentra produksi kunyit terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2025, produksi kunyit di Kota Solok mencapai 80.000 kg, menurun dari tahun sebelumnya yang hanya 110.000 kg seperti pada (Lampiran 5). Penurunan produksi ini sebenarnya hanya cerminan dari sebuah masalah yang jauh lebih besar dimana semakin sempitnya lahan bagi pertanian kunyit di Kota Solok. Jika kita lihat data dari lima tahun terakhir, perkembangan luas lahan kunyit tidak sama dengan pertumbuhan permukiman. Pada tahun 2020, lahan kunyit masih mencapai sekitar 879 hektar. Namun sejak 2021, lahan mulai berkurang, dan penurunan paling drastis terjadi pada 2023 ketika hanya dalam waktu satu tahun, lahan kunyit turun dari 876 hektar menjadi hanya 125,45 hektar. Itu adalah penurunan sebesar 750,55 hektar hampir 86 persen dari luas lahan tahunan sebelumnya. Meskipun tahun 2024 dan 2025 menunjukkan sedikit pemulihan, luas lahan tetap berada jauh di bawah kondisi awalnya.

Ada dua hal yang mendorong penurunan ini. Pertama, adalah tekanan urbanisasi yang tidak terbandung. Dengan wilayah Kota Solok yang hanya 57,64 km² dan terus bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan lahan untuk rumah tinggal, perkantoran, dan sarana publik meningkat drastis. Lahan pertanian, khususnya lahan kunyit yang sering berposisi di pinggiran kota atau tepi permukiman, menjadi target utama konversi. Petani melepas lahannya bukan hanya karena desakan ekonomi jangka pendek, tetapi juga karena mereka melihat masa depan pertanian menjadi semakin tidak menjanjikan. Hal kedua yang sama pentingnya adalah permasalahan teknis budidaya. Serangan penyakit jamur pada rimpang kunyit yang telah dijelaskan sebelumnya membuat hasil panen menurun signifikan. Ketika petani menghadapi pilihan antara terus berusaha dengan hasil yang menurun atau menjual lahan dengan harga yang terus meningkat, keputusan ekonomi mereka cenderung jelas. Banyak petani kunyit akhirnya beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih stabil atau menjual lahannya sama sekali. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya akses petani terhadap bibit sehat dan bersertifikat, seiring terhentinya bantuan bibit dari pemerintah sejak tahun 2023.

Meskipun potensi usahatani kunyit di Kota Solok sangat besar, kajian ilmiah yang secara khusus menganalisis viabilitas finansialnya dalam konteks tantangan lapangan yang tengah dihadapi masih sangat terbatas. Penelitian Amelia et al. (2023) yang menganalisis usahatani kunyit di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok menunjukkan prospek yang baik, namun dilakukan sebelum tekanan hama penyakit jamur pada rimpang dan gelombang peralihan petani ke komoditas jagung menguat seperti saat ini, serta belum menganalisis kontribusi pendapatan usaha tani terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Kondisi lapangan yang berubah ini menyebabkan belum tersedianya data empiris yang mutakhir dan komprehensif mengenai viabilitas finansial usahatani kunyit di tengah tekanan produksi yang nyata. Padahal menurut Suratiyah (2015), informasi tentang analisis usahatani yang komprehensif sangat dibutuhkan, baik oleh petani sebagai dasar pengambilan keputusan berusaha tani, maupun oleh pemerintah daerah sebagai landasan perumusan kebijakan pengembangan sektor pertanian yang tepat sasaran.

Menarik pula untuk dicermati bahwa usahatani kunyit di Kota Solok sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan soal produksi pertanian semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih luas, yaitu pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif Pembangunan Wilayah, kegiatan pertanian yang berlangsung di kawasan perkotaan seperti Kota Solok tetap memiliki fungsi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemberdayaan masyarakat, terlepas dari status administratif wilayahnya yang berciri perkotaan. Ginanjar Kartasasmita (1997) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan usaha produktif berbasis potensi lokal. Usahatani kunyit di Kota Solok merupakan cerminan nyata dari semangat pemberdayaan tersebut: masyarakat memanfaatkan potensi agroklimat wilayahnya sendiri untuk membangun sumber penghidupan yang mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan kelompok tani aktif, rantai pasok lokal yang melibatkan pedagang pengumpul, serta dinamika hubungan antarpetani di Kota Solok menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan ekonomi wilayah dari bawah (*bottom-up regional development*). Todaro dan Smith (2011) mengingatkan bahwa pembangunan yang bermakna bukan sekadar pertumbuhan output, melainkan peningkatan kapasitas manusia dan komunitas untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki secara berdaya guna. Dalam konteks ini, penelitian terhadap viabilitas dan kontribusi usahatani kunyit di Kota Solok relevan pula sebagai kajian tentang seberapa jauh pertanian perkotaan mampu menjalankan perannya sebagai fondasi ekonomi komunitas dan instrumen pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang viabilitas dan kontribusi usahatani kunyit terhadap masyarakat di Kota Solok menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Di tengah tekanan berlapis yang dihadapi petani kunyit di Kota Solok, mulai dari serangan hama dan penyakit jamur pada rimpang, peralihan sebagian petani ke komoditas jagung, hingga terhentinya bantuan bibit pemerintah

sejak 2023, diperlukan data empiris yang sahih tentang kondisi viabilitas finansial usahatani kunyit saat ini. Penelitian ini akan mengisi kekosongan kajian ilmiah yang ada dengan menganalisis kelayakan finansial usahatani kunyit secara komprehensif menggunakan indikator R/C Ratio, sekaligus mengukur besaran kontribusi pendapatan usahatani kunyit terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang prospek ekonomi usahatani kunyit di Kota Solok, serta menjadi referensi bagi petani, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan sektor pertanian kunyit yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Kota Solok merupakan kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Barat, namun memiliki keunggulan agroklimat yang spesifik dan sangat mendukung pengembangan komoditas hortikultura, khususnya kunyit. Kondisi penggunaan lahan di Kota Solok menunjukkan keterbatasan yang signifikan untuk pengembangan pertanian konvensional. Dari total luas wilayah, hanya 21,76% berupa tanah sawah sementara 78,24% berupa tanah kering (BPS Kota Solok, 2024). Lahan sawah yang ada pun terus mengalami tekanan konversi menjadi lahan permukiman dan fasilitas perkotaan lainnya. Pada tahun 2023, luas lahan sawah tercatat 875,6 hektar, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat alih fungsi lahan. Fenomena konversi lahan ini sejalan dengan temuan Irawan (2005) yang menyatakan bahwa lahan pertanian di wilayah perkotaan secara konsisten mengalami tekanan konversi akibat ekspansi pembangunan non-pertanian.

Dari sisi infrastruktur, Kota Solok memiliki akses pasar yang relatif baik dengan keberadaan Pasar Raya Solok dan pasar-pasar kelurahan yang tersebar di berbagai lokasi. Kedekatan dengan Kabupaten Solok yang merupakan sentra produksi pertanian memberikan akses terhadap input produksi pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida dengan harga yang kompetitif. Aksesibilitas transportasi yang baik melalui jalur lintas Sumatera memudahkan distribusi produk kunyit ke kota-kota lain di Sumatera Barat maupun ke luar provinsi. Limbong dan Sitorus (1987) menyatakan bahwa akses pasar yang baik merupakan salah satu faktor penentu efisiensi sistem

pemasaran pertanian, yang pada akhirnya berdampak langsung pada tingkat harga yang diterima petani (*farm gate price*).

Dari sisi kondisi sosial ekonomi petani, penelitian Handayani (2020) menunjukkan bahwa rata-rata petani rempah-rempah di Sumatera Barat memiliki luas lahan garapan yang relatif kecil, yaitu antara 0,25-0,75 hektar per keluarga. Keterbatasan skala usaha ini berdampak pada kemampuan petani untuk menanggung biaya produksi dan risiko fluktuasi harga, serta mempengaruhi kemampuan mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Di Kota Solok, kondisi ini diperburuk oleh dua tekanan lapangan yang nyata seperti pertama, serangan hama dan penyakit jamur pada rimpang kunyit yang semakin meluas dan menyebabkan penurunan produktivitas secara signifikan. Kedua, terhentinya bantuan bibit dari Dinas Pertanian Kota Solok sejak tahun 2023, yang memaksa petani menanggung sendiri seluruh biaya pengadaan bibit sebagai komponen input terbesar. Akibat tekanan-tekanan tersebut, sebagian petani mulai meninggalkan usahatani kunyit dan beralih ke tanaman jagung yang dinilai lebih menguntungkan dan berumur panen lebih singkat. Pergeseran ini mengancam keberlangsungan budidaya kunyit sebagai komoditas unggulan di Kota Solok. Kondisi ini menjadikan analisis viabilitas finansial semakin penting dan mendesak untuk memastikan apakah usahatani kunyit masih benar-benar layak dan menguntungkan bagi petani berskala kecil di Kota Solok dalam kondisi lapangan saat ini.

Saptana (2010) mengemukakan bahwa efisiensi usahatani pangan dan hortikultura di Indonesia masih dapat ditingkatkan secara signifikan melalui penerapan teknologi yang tepat, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan sistem pemasaran yang efisien. Dalam konteks usahatani kunyit di Kota Solok, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan tingkat keuntungan usahatani merupakan langkah awal yang krusial sebelum dapat dirumuskan strategi pengembangan yang tepat sasaran. Tanpa data empiris yang komprehensif tentang viabilitas dan kontribusi usahatani kunyit, upaya pengembangan yang dilakukan baik oleh petani maupun pemerintah daerah akan berjalan tanpa landasan ilmiah yang kokoh.

Berdasarkan deskripsi kondisi Kota Solok di atas, teridentifikasi dua permasalahan inti yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, meskipun Kota Solok memiliki keunggulan agroklimat yang diakui secara nasional dan didukung program RPJMD 2021–2026, belum ada data empiris yang membuktikan apakah usahatani kunyit benar-benar layak secara finansial bagi petani perkotaan yang menjalankannya dalam kondisi lapangan saat ini. Keterbatasan lahan (hanya 21,76% lahan sawah dengan penyusutan rata-rata 1,44 Ha/tahun), tingginya biaya sewa lahan dan tenaga kerja perkotaan, serta skala usaha yang relatif kecil (0,25–0,75 ha per keluarga) berpotensi menekan viabilitas finansial petani secara signifikan. Ancaman ini semakin berat dengan meluasnya serangan hama dan penyakit jamur pada rimpang kunyit yang menekan produktivitas, serta terhentinya bantuan bibit dari pemerintah sejak tahun 2023 yang memaksa petani menanggung seluruh biaya input produksi secara mandiri. Kondisi tersebut mendorong sebagian petani beralih ke tanaman jagung yang dianggap lebih menjanjikan, sehingga jumlah petani kunyit aktif di Kota Solok terus menyusut. Kedua, sekalipun potensi pendapatan dari usahatani kunyit cukup menjanjikan, belum diketahui seberapa besar sesungguhnya kontribusi pendapatan dari usaha ini terhadap total pendapatan rumah tangga petani perkotaan di Kota Solok.

Berdasarkan analisis dan identifikasi telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana viabilitas finansial usahatani kunyit di kawasan perkotaan Kota Solok?
2. Seberapa besar kontribusi pendapatan usahatani kunyit terhadap total pendapatan rumah tangga petani perkotaan di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui viabilitas finansial usahatani kunyit di Kota Solok
2. Untuk menganalisis kontribusi pendapatan dari usahatani terhadap pendapatan rumah tangga petani perkotaan di Kota Solok

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan yaitu :

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui apakah pendapatan petani viabel atau tidak terhadap hasil dari usahatani kunyit
2. Sebagai bahan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya
3. Sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sehingga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh

